



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAYU YUNIARTO SUHARTO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 724946

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 782 m²/120 m² di KAB / KOTA MINAHASA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m²/50 m² di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 768 m² di KAB / KOTA MINAHASA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 600 m² di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 87.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 165.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 42.045.397

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 994.045.397

III. HUTANG

Rp. 132.563.833



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

861.481.564

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.